

Kritik Sebagai Metode dan Etika Ilmuan Dalam Merekonstruksi Pendidikan Islam dan Pemberdayaan Umat

Oleh Abdul Munir Mul Khan

Dialektika Ilmu, Pembangunan, dan Realitas

Pembangunan sebagai dasar operasional modernisasi, ternyata

tidak seluruhnya berhasil mendorong seluruh masyarakat mencapai kualitas hidup sebagaimana telah dirancang. Akibatnya muncullah kesenjangan sosial yang dapat menghambat gerak laju pembangunan itu sendiri. Berdasarkan laju pembangunan di setiap kawasan, dunia terbagi menjadi

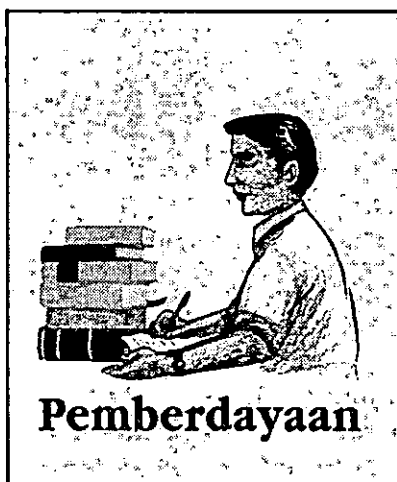
wilayah utara bagi bangsa berkemajuan dan selatan bagi bangsa yang terbelakang, sebagai bagian terbesar komunitas yang berakar dari sistem sosial-budaya, ketiadaan peluang, dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena

itu, pemecahannya harus dikaitkan pula dengan problem sistem budaya, pemberian peluang, dan pendidikan.

Dalam hubungan dengan itu, kebijakan pembangunan yang sentralistik dan berorientasi makro, dianggap kurang memberi peluang bagi kelompok tertinggal untuk maju, sehingga semakin mempertajam kesenjangan sosial. Untuk itu, maka pemberdayaan harus dirancang sebagai upaya agar masyarakat yang kurang me-

miliki peluang dan kemampuan dapat mengikuti laju pembangunan mencapai kualitas hidup dan memperkecil atau meniadakan kesenjangan sosial.

Kawasan kota yang dihuni bagian kecil masyarakat, memiliki ke-



cepatan gerak dan kelimpah-ruahan sarana sosial ekonomi maju dengan cepat, sehingga semakin berbeda dengan pedesaan yang sebaliknya. Padahal orang kota tidak mungkin hidup kecuali mengkonsumsi produk desa, biaya hidupnya lebih murah daripada orang desa karena waktu dan tenaga orang kota dihargai lebih tinggi. Pendidikan adalah variabel utama dari adanya kenyataan itu dan bagi pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan terutama muncul dari Amerika Latin seperti *Paulo Freire*, *Mahbubul Haq* dari Pakistan, dan *Willy Brant* dari Jerman. Konsepnya meluas sejak tahun 80-an dan paling populer di kalangan LSM yang sering dituduh kiri-kirian, sosialis, dan marxian. Namun, sikap kritisnya penting bagi analisis negatif pembangunan dan modernisasi, bahkan juga dalam mengkaji fungsi keagamaan dan pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat.

Dari kajian kritis dapat dijernihkan kesadaran atas fungsi ilmu dan kebudayaan serta kedudukan ilmu kealaman dan humaniora, yang dipandang lebih rendah daripada ilmu keislaman dari Alquran dan Sunnah. Hal ini menyebabkan sikap mendua terhadap ilmu kealaman

dan humaniora yang dalam sejarah banyak berkembang di lingkungan peradaban Barat, walaupun perkembangan pendidikan Islam tidak terlepas daripadanya. Sementara peradaban Barat merupakan kelanjutan peradaban Islam (*Iqbal*, 1966), tidak ada ilmu keislaman yang benar-benar termasuk pendidikan Islam (*al Attas*, 1992).

Sikap mendua dan "penyingkiran" ilmu kealaman dan humaniora di atas, telah menyebabkan ilmu keislaman beberapa ratus tahun tersingkir dari dinamika dunia ilmu. Komunitas ilmuwan Muslim tidak tertarik meneliti fenomena humaniora dan alam seperti fisika, walaupun banyak firman secara jelas menempatkan *ketakterhinggaan*

mekanika kuantum sebagai standar keterhinggaan realitas untuk menjelaskan asal muasal semesta (*Hawking*, 1995), pemikiran dan pendidikan Islam tidak banyak terlibat dalam dialog itu. Padahal, penempatan ilmu dan pendidikan Islam dalam dinamika ilmu moderen tersebut, merupakan upaya pemberdayaan paling strategis (*Madjid*, 1995).

Walaupun ilmu moderen ber-

Sikap mendua dan "penyingkiran" ilmu kealaman dan humaniora di atas, telah menyebabkan ilmu keislaman beberapa ratus tahun tersingkir dari dinamika dunia ilmu

sumber dari materialisme keterhinggaan dan ketidakmungkinan metafisika, namun ia terus melakukan kritik atas dirinya sendiri yang telah mendorong pertanyaan paling mendasar mengenai sumber seluruh daya alam dan kemanusiaan. Ketika teori fisika moderen masih tetap gagal menjelaskan gerak benda yang lebih cepat dari cahaya tanpa kehilangan massa seperti peristiwa *isra' mi'raj* Muhammad Saw, tantangan sekaligus peluang ilmuwan Muslim ialah menjelaskan fenomena itu dalam logika ilmiah moderen. Namun untuk itu diperlukan wawasan yang lebih jernih atas fungsi ilmu kealaman dan humaniora dalam mengembangkan kualitas iman.

Dalam konteks tersebut, maka dibutuhkan suatu konsep yang menjernihkan ambivalensi dasar filsafat, tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan Islam, atau yang disebut pendidikan Islam

Pemberdayaan dan Rekonseptualisasi Pendidikan Islam

Tanpa sikap lebih kritis dan terbuka tersebut, pemikiran dan pendidikan Islam akan terus menghadapi dilema berkepanjangan. Secara praktis pemikiran dan pendidikan Islam tidak bisa keluar dari pergumulan pemikiran ilmiah yang lahir dari pemikiran Barat moderen. Kecuali, tuntutan melakukan kritik ulang terhadap khasanah pemikiran dan pendidikan Islam, sekaligus

terhadap pemikiran moderen. Melalui jalan ini diharapkan akan muncul berbagai konsep sebagai pemecahan problem, dilema pemikiran, dan pendidikan Islam serta pemecahan terhadap persoalan kemanusiaan secara universal.

Dalam konteks tersebut, maka dibutuhkan suatu konsep yang menjernihkan ambivalensi dasar filsafat, tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan Islam, atau yang disebut pendidikan Islam. Pemanfaatan teori pendidikan dari Filsafat Barat dengan tetap menjadikan ajaran Islam sebagai sumber kurikulum, akan berhadapan dengan tuntutan relevansi yang tidak bisa dihindari. Sementara pemikiran Islam klasik belum banyak dikaji sebagai sumber historis, yaitu pemikiran sebagai produk masyarakat ratusan tahun lalu itu, jauh berbeda dari situasi sosial di mana pendidikan Islam harus berperan di dalamnya.

Akibatnya, setiap materi kealaman ditempatkan dalam susunan kurikulum yang kurang memberi peluang pengembangan daya kritis dan kreatif sebagai esensi sikap ilmiah. Pendidikan Islam kemudian terkesan menjadi indoktrinasi, sementara pemberdayaan justru

menuntut adanya daya kreatif dengan metode yang relevan, yang banyak dikaji dalam pemikiran moderen.

Kecenderungan di atas juga mengakibatkan kurikulum Fakultas Tarbiyah mengalami pemborosan hampir 30 %, dalam bentuk pengulangan banyak topik dalam berbagai bidang studi di semua jurusan (lihat *Topik Inti*, Ditjen Binbaga, 1995). Konsep tujuan bidang studi dan kelembagaupun bersifat abstrak dan luas meliputi seluruh kesadaran Islam tanpa usaha spesifikasi lebih teoritis.

Hal ini mempersulit penyusunan kurikulum, metode, dan proses belajar-mengajar yang cukup jelas dan empirikal (*Nasution*, 1982). Sebagai contoh, rumusan tujuan setiap bidang studi, lebih ditekankan sebagai pendidikan profesi daripada pengembangan ilmu dalam repetisi formulasi "mengetahui, menghafalkan, dan mengamalkan" di semua fakultas dan jurusan, dengan anggapan dasar telah selesainya seluruh persoalan Islam dalam seluruh khasanah klasik ratusan tahun sebelumnya.

Di bagian lain, segi kelembagaan juga belum ada penjelasan teo-

ritis struktur hubungan pesantren, madrasah, dan sekolah maupun fakultas dan jurusannya, dengan tujuan pendidikan di atas. Dalam banyak hal, ahli pendidikan pesantren atau madrasah sulit diketemukan dari sistem pendidikan Islam. Sistematisasi jurusan di berbagai fakultas di IAIN dan perguruan tinggi Islam lain misalnya, juga kurang memiliki dasar teoritis dan relevansi dengan dunia obyektif umat.

Disini perlu dipertimbangkan penjurusan di Fakultas Tarbiyah yang lebih mengacu pada realitas empiris pendidikan di kalangan umat seperti jurusan Pesantren, Madrasah, dan Sekolah. Secara teoritis, penyusunan kurikulum juga perlu mengacu pada sumber orientasi kebutuh-

an obyektif umat dan dunia kerja, serta sumber orientasi teologis secara integral, sistematis, dan fungsional.

Oleh karena itu, perlu adanya sistematisasi struktur kurikulum semua jenjang pendidikan, sehingga tidak terjadi repetisi materi bidang studi semua jenjang dan tingkat pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi. Di SD dibatasi dari kebutuhan praktis beribadah,

Secara teoritis, penyusunan kurikulum juga perlu mengacu pada sumber orientasi kebutuhan obyektif umat dan dunia kerja, serta sumber orientasi teologis secara integral, sistematis, dan fungsional

SLTP dan SLTA baru memasuki sistem ajaran, dan perguruan tinggi dikaji dasar-dasar sistem dan kerangka rasional, seperti Ushul Fiqh, sehingga kaifiat ibadah tidak perlu lagi. Dengan demikian diharapkan lahir ahli fiqh dan tafsir bukan hanya ahli fuqaha dan mufassir.

Dalam semua teks, tujuan pendidikan Islam selalu dihubungkan dengan konsep *kepribadian muslim* atau *insan kamil*, atau *taqwa* dan atau sasaran tujuan yang sepadan lainnya. Banyak di antara buku yang menjadi referensi utama Tarbiyah menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam identik dengan tujuan hidup manusia. Akibatnya, semua kegiatan manusia bisa, sekaligus tidak bisa, untuk disebut sebagai pendidikan Islam yang bisa disebut berhasil sekaligus gagal mencapai tujuan.

Hal itu dapat dikaji dari pendapat beberapa ahli yang populer di dunia pendidikan Islam. *Athiyah al Abrasyi* menyebutkan; pendidikan Islam adalah pendidikan budi pekerti yang maksudnya bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui. Mencapai akhlak sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan (1977:15).

Tujuan dan definisi pendidikan Islam yang sudah tampak abstrak itu, masih diperabstrak lagi dengan menyatakan, bahwa "tujuan pendidikan Islam identik dengan tujuan hidup muslim"

Menurut *As-Syaibany*, dasarnya ialah perubahan tingkah laku, di mana ruh dan akhlak merupakan tujuan pertama dan tertinggi, yaitu apa yang tidak bertentangan dengan ruh Islam (1979:359-406). *Zakiah Daradjat* menyatakan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam dengan tujuan, kepribadian yang mengantarkan seseorang yang membuatnya menjadi "*insan kamil*" (1992:27-31).

Tujuan dan definisi pendidikan Islam yang sudah tampak abstrak itu, masih diperabstrak lagi dengan menyatakan, bahwa "tujuan pendidikan Islam identik dengan tujuan hidup muslim". Hal ini sering membuat kurikulum disusun seluas dimensi hidup, sehingga pendidikan Islam kele-

bihan beban dari yang dapat dipikul sesuai jenjang dan spesifikasi tiap lembaga, jurusan, dan fakultas yang rumusannya juga kurang jelas itu. Seluruh bidang yang dapat diambil dari Alquran dan Hadits kemudian disusun sebagai keseluruhan materi pendidikan Islam.

Konsep di atas tidak menjadi soal, sepanjang dapat dirinci dan diidentifikasi secara empirik. Sayangnya, upaya ini belum banyak dila-

kukan atau bahkan seringkali dianggap tidak perlu. Akibatnya, pemikiran tentang pendidikan Islam baik filsafat, ilmu (teori), sejarah, metode, hingga kurikulum tidak banyak berkembang secara berarti. Rumusan tujuan yang terlalu luas dan abstrak, sulit dijadikan referensi penyusunan kurikulum dan tujuan-tujuan yang lebih khusus seperti penyusunan kurikulum dan tujuan-tujuan yang lebih khusus seperti bagi IAIN, Universitas, Aliyah, Pondok, atau SMU (Islam).

Salah satu identifikasi penting untuk melihat hal tersebut ialah bentuk kelakuan empirik yang dapat diamati setelah peserta didik menjalani proses pendidikan Islam (lihat *Ralph Tyler, dalam Nasution, 1982: 38-40*). Taksonomi Bloom dan Krathwohl memadai sebagai tiga aspek tujuan; kognisi, afeksi dan psikomotor bagi tingkat dasar (1982:34-35). Bagi pendidikan tinggi perlu ditambah bagi pengembangan ilmu dengan daya kreatif dan kritis.

Identifikasi itu juga dapat diberlakukan bagi perilaku insan kamil, sehingga mempermudah pengembangan proses belajar-mengajar serta penyusunan kurikulum.

pendidikan adalah proses pengembangan ilmu sebagai kunci memahami seluruh realitas kontekstual alam sebagai sunnatullah, sehingga ilmu menjadi media memahami dan menghayati Tuhan dalam bentuk kelakuan empirik ketundukan kepada segala aturan Allah

Sebagai contoh, insan kamil bisa diartikan secara operasional sebagai "kemampuan berfikir logis, jujur, disiplin, memiliki etos dan ketrampilan kerja, mampu mengisi jabatan-jabatan dalam masyarakat, baik berkaitan dunia kerja maupun dunia sosial lebih luas" seperti dawah. Perilaku lebih intelektual seperti kemampuan mengembangkan pemikiran di bidang; qaidah hukum, tafsir, kalam, dan ijtihad, hingga bidang-bidang kealaman lainnya, dapat dipertimbangkan bagi pendidikan tinggi.

Asumsi dasarnya, pendidikan adalah proses pengembangan ilmu sebagai kunci memahami seluruh realitas kontekstual alam sebagai sunnatullah, sehingga ilmu menjadi media memahami dan menghayati Tuhan dalam bentuk kelakuan empirik ketundukan

kepada segala aturan Allah. Tujuan pendidikan Islam merupakan kekhususan tujuan hidup, tidak diidentifikasikan sebagai dasar rumusan tujuan spesifik Universitas, Institut, Pondok, SMU, Madrasah, dan lainnya. Seluruhnya secara sistematis menjadi kerangka dasar pencapaian tujuan pendidikan Islam yang lebih luas dan dari tujuan kelembagaan itu disusun kuri-

kulum yang paling mungkin dipergunakan mencapai tujuan.

Tanpa rekonseptualisasi itu, menghubungkan pendidikan Islam dengan pemberdayaan umat, merupakan sesuatu yang kabur dan tidak fungsional. Karena itu hubungan pendidikan Islam dengan pemberdayaan umat memerlukan wawasan filosofis sebagai konsep dasar dan pragmatis teknologis untuk menyiapkan peserta didik berperan dalam masyarakatnya. Penyelesaian persoalan ini secara instrinsik merupakan pemberdayaan pendidikan Islam itu sendiri.

Selain itu, diperlukan suatu sikap kritis dan operasional mental reorientasi dan restrukturisasi, fungsionalisasi pendidikan Islam bagi pemberdayaan umat, bukanlah suatu yang mustahil. Namun, perlu disadari bahwa seluruh praktek pendidikan Islam tidak sengaja dikembangkan untuk fungsi-fungsi ekonomi, apalagi politik. Hanya sekolah (sekuler ?) yang berhubungan dengan fungsi ekonomi, sementara dalam wawasan keagamaan muslim, lembaga ini sulit disebut pendidikan Islam hanya karena tidak memakai nama Islam.

Pendidikan madrasah, pondok, dan juga IAIN, tanpa menempatkan bidang studi yang secara langsung berkaitan dengan fungsi ekonomi sebagai bidang keislaman, sulit diperoleh kemampuan pemberdayaan

KKN dan Pemberdayaan Sosial-ekonomi Umat

Terlepas dari persoalan di atas, upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui pendidikan Islam akan meliputi dua wilayah yaitu, masyarakat luas, dan mereka yang terlibat secara formal dalam kegiatan pendidikan. Wilayah pertama akan dibicarakan secara khusus, sementara wilayah kedua akan melibatkan unsur pendidik dan peserta didik. Dalam hubungan inilah rekonseptualisasi tujuan kelembagaan dan bidang studi perlu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan dimensi pemberdayaan ekonomi, yang tidak hanya berkaitan dengan mental dimensi fisik-material melainkan juga berkaitan dengan mental intelektual.

Pendidikan madrasah, pondok, dan juga IAIN, tanpa menempatkan bidang studi yang secara langsung berkaitan dengan fungsi ekonomi sebagai bidang keislaman, sulit diperoleh kemampuan pemberdayaan. Tanpa merubah kurikulum atau pun konsep tujuan, bukan berarti pemberdayaan ekonomi tak dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan praktikum atau ekstra kurikuler. Hal ini penting karena pe-

nurunan partisipasi pendidikan muslim di tingkat pendidikan lebih tinggi. Banyak lulusan SD muslim tidak ke SLTP dan selanjutnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, jumlahnya nominal mereka yang tidak melanjutkan sekolah juga semakin besar.

Bagi IAIN, khususnya Fakultas Tarbiyah, perlu dipertimbangkan pengembangan wawasan tenaga edukatif dan mahasiswa terhadap wilayah kemanusiaan dan kehidupan yang lebih luas. Dalam masa moderen yang mulai memasuki tahapan pasca industri, sebagian besar masyarakat yang muslim, masih berada pada tahapan akhir masyarakat agraris. Dalam situasi demikian, tidak ada ilmu pengetahuan dan ilmunan yang secara eksklusif bebas dari ketergantungan globalisasi ilmu.

Mengatasi masalah ini, baik staf edukatif ataupun mahasiswa, harus mengembangkan budaya baca dan memiliki kekayaan informasi. Penguasaan dua hal tersebut merupakan kekuatan utama masyarakat pasca industri yang sekaligus memiliki fungsi ekonomis. Untuk itu

diperlukan kemampuan penyajian informasi melalui berbagai sarana komunikasi moderen yang tersedia dan semakin luas melalui media cetak (ilmiah, ilmiah populer, fiksi, non-fiksi serta lainnya). Kegiatan penelitian merupakan media utama pengembangan kemampuan tersebut.

Pemberdayaan ekonomi umat dalam masyarakat luas, dapat dilakukan jika lembaga pendidikan

Posisi paling lemah, strata bawah, berkaitan dengan jaringan dan informasi pasar akibat struktur ekonomi. Karena itu, advokasi ekonomi merupakan strategi penting bagi peningkatan kemampuan tawar-menawar terhadap lembaga ekonomi moderen dan pada konsumen

khususnya pendidikan tinggi Islam melalui *Tri Dharma Perguruan Tinggi*, mengembangkan kegiatan yang langsung menyentuh kemampuan masyarakat dalam fungsi-fungsi ekonomi industrial. Latihan-latihan kerja produktif di luar lembaga ekonomi formal, perlu dipertimbangkan, sehingga masyarakat strata bawah

mampu meningkatkan produktivitas bidang jasa dan pertanian.

Posisi paling lemah, strata bawah, berkaitan dengan jaringan dan informasi pasar akibat struktur ekonomi. Karena itu, advokasi ekonomi merupakan strategi penting bagi peningkatan kemampuan tawar-menawar terhadap lembaga ekonomi moderen dan pada konsumen.

Para mahasiswa dapat bekerjasama dengan Depnaker atau LSM, sehingga suatu kawasan ekonomi lapis bawah bersatu berhadapan dengan kekerasan ekonomi pasar, di samping kemampuan mengorganisasi diri serta peluang berusaha.

Modal usaha dari kredit, bagi sebagian besar masyarakat, sering menimbulkan persoalan, sehingga yang lebih mendesak ialah perlindungan dan peletakan ekonomi keluarga sebagai basis ekonomi nasional dan moderen lainnya. Karena itu, kegiatan KKN (*Kuliah Kerja Nyata*), menjadi sangat strategis untuk mendukung upaya ini.

Posisi strategis kegiatan di atas, ditunjukkan oleh data statistik hasil sensus 1990. Di samping itu berbagai penelitian menunjukkan bahwa agama bersama pendidikan dan pekerjaan, merupakan faktor kunci ke arah mana perilaku seseorang ditujukan. Partisipasi pendidikan akan menunjukkan ke arah mana seseorang bekerja dan pada tingkat mana status ekonomi, serta seberapa tinggi kerentanan keagamaan atau keimanan seseorang.

Walaupun ada pergeseran penduduk muslim usia 10 tahun ke atas dari petani ke sektor moderen se-

perti perdagangan dan industri, bagian terbesarnya masih tetap berada di sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan tingkat partisipasi pendidikan yang menunjukkan kecenderungan tidak tamat SD. Suatu kecenderungan yang menggembarakan, adalah adanya perubahan radikal tingkat partisipasi pendidikan tingkat SD selama 10 tahun antara 1980 dan 1990.

Jika tahun 1980 usia 10 ke atas penduduk muslim tidak tamat SD berjumlah 63,3 juta lebih, 10 tahun berikutnya turun menjadi 57 juta lebih (10%). Usia yang sama secara nasional justru naik sekitar 18 juta atau 25 %. Pada tahun 1990, usia 10 tahun ke atas muslim bekerja di sektor pertanian masih meliputi 70,6 juta lebih

Walaupun ada pergeseran penduduk muslim usia 10 tahun ke atas dari petani ke sektor moderen seperti perdagangan dan industri, bagian terbesarnya masih tetap berada di sektor pertanian

atau 60 %. Sementara yang lulus SLTA ke atas sebanyak 10,2% atau sekitar 12 juta lebih, dan yang tamat akademi ke atas hanya 1,3% atau sekitar 1,5 juta lebih (BPS, 1984; 1994).

Jumlah putus sekolah pada tingkat pendidikan di atasnya, dapat dilihat dari data selanjutnya. Menurut sensus 1990, usia SD (7-12 tahun) sekitar 19,7 juta lebih, usia 13-15 tahun (SLTP) 13,9 juta lebih, usia 16-18 tahun (SLTA) sekitar 18,9

juta lebih, dan usia 19-23 tahun (PT), 16,1 juta lebih. Sementara jumlah yang masih sekolah sekitar 36,8 juta lebih, sehingga jumlah usia SD hingga PT yang tidak sekolah (DO) sekitar 31,9 juta lebih atau 46% lebih (BPS, 1994).

Tahun 1994, penduduk usia 13-15 tahun (SLTP), 13 juta lebih dan siswa SLTP kurang dari 7 juta. Dari lulusan SD dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) 93/94 yang 1,2 juta, 38 % tidak melanjutkan ke SLTP. Sementara dari lulusan SLTP, hampir 1/2 juta tidak lanjut ke SLTA, sama dengan yang putus SLTP. Partisipasi MI dan Tsanawiyah 1993 atas pendidikan dasar (SD/SLTP) sekitar 14% (Djojonegoro, 1994).

Data di atas menunjukkan bahwa pekerja muslim tetap paling besar di sektor pertanian dan buruh dengan pendidikan rendah. Pemberdayaan ekonomi umat tidak dapat dilakukan hanya dengan pendidikan, walaupun dengan konsep anak-asuh, karena bagi orang miskin anak adalah tenaga kerja atau alat produksi. Pengembangan anak-asuh perlu disertai pengayaan bidang usaha orangtua mereka.

Penyebab munculnya kemiskinan, paling tidak dipengaruhi sekitar 20 faktor utama ketakberdayaan. Secara langsung, kemiskinan menyebabkan ketakberdayaan, keterisolasian, kerawanan/kerentanan, dan kelemahan fisik akibat kurang gizi. Di samping tingkat pendidikan rendah, terbesar tinggal di pedesaan dengan kemampuan keterampilan dan produktivitas rendah, komunikasi terbatas, ha-

rapan masa depan terbatas (bulan depan bagi mereka adalah hari ini).

Kemampuan menabung bagi mereka rendah, karena apa yang didapat hari ini untuk makan kemarin, dan sangat spekulatif, sehingga mudah terbujuk janji-janji yang menerbitkan harapan baru, dengan rumah tempat tinggal yang tidak hi-

gienes. Pemberdayaan ekonomi, bisa mengambil satu di antara mata rantai kemiskinan (Chambers, 1987:145-148).

Beberapa tindakan kedermawanan memang dapat dilakukan seperti peningkatan gizi melalui pemindahan acara syukuran yang biasa dilakukan orang kota ke desa, atau perbaikan tempat tinggal,

**Penyebab
munculnya kemiskinan,
paling tidak dipengaruhi sekitar
20 faktor utama ketakberdayaan.
Secara langsung,
kemiskinan menyebabkan ketakberdayaan,
keterisolasian, kerawanan/
kerentanan, dan kelemahan fisik
akibat kurang gizi**

membuka jaringan komunikasi bidang ekonomi, sekaligus membuka belenggu mata rantai lainnya. Komunikasi, berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berbahasa Indonesia. Buta aksara dan bahasa, menyebabkan seseorang buta hak-hak sosial dan ekonomi serta politik. Karena itu, pengembangan kemampuan membaca cukup strategis membuka hubungan dengan dunia luar, sehingga menumbuhkan kesadaran kritis mengenai situasi yang kini melingkupi.

Memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat bawah di atas, mungkin perlu mencermati UU No. 2/1992. UU ini secara rinci melukiskan mengenai ketahanan keluarga yang meliputi aspek kemampuan fisik, material, psikhis, mental, dan spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri bersama keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Peningkatan kualitas keluarga meliputi tahapan; pra-ks, ks-1, ks-2, ks-3, ks-3 plus. Ks-1 dengan indikasi; makan dua kali, memiliki dua pakaian lebih; rumah hanya sebagian kecil yang berlantai tanah;

apresiasi atas kesehatan moderen (*Prisma* No.6 Th XXIII, 1994). Beberapa rincian aspek ketahanan dan indikasi kesejahteraan keluarga tersebut, perlu dicermati bagi pengembangan program pemberdayaan.

Persoalan menjadi semakin rumit ketika pengembangan industri berkaitan dengan pengurangan lahan pertanian yang biasanya mengorbankan petani kecil, sehingga

mereka kehilangan alat produksi utama yaitu lahan pertanian. Karena itu pengembangan kawasan industri di daerah pertanian produktif, perlu dibarengi dengan upaya meningkatkan kemampuan kerja masyarakat bawah yang terkena pembebasan tanah pada sektor jasa atau transmigrasi. Dalam hu-

bungan inilah mahasiswa dapat terlibat dengan memberikan penyuluhan transmigrasi, bekerjasama dengan Deptrans dan Depnaker.

Uraian di atas sekedar gambaran kasar masalah yang segera dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sudah tentu untuk menyusun program yang lebih realistik memerlukan kajian lanjut dan

Komunikasi, berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berbahasa Indonesia. Buta aksara dan bahasa, menyebabkan seseorang buta hak-hak sosial dan ekonomi serta politik

data yang lebih detail serta aktual. Jika mahasiswa IAIN dapat melakukan kegiatan demikian berdasarkan proposal yang masuk akal dan realistis, sudah merupakan awal upaya jangka panjang yang strategis bagi peningkatan kualitas kehidupan umat dan bangsa sekaligus. Melalui pengembangan pengelolaan berbagai kegiatan keagamaan seperti zakat dan infaq, banyak hal bisa dilakukan.

Siapa dan kapan harus dimulai, tidak harus menunggu kesepakatan semua yang berduit atau berkuasa. Banyak persoalan besar dapat diselesaikan ketika setiap individu yang merasa terpanggil dan memiliki idealisme kemanusiaan yang tinggi memulai bertindak sesuai kemampuan dan fasilitas yang tersedia. Persoalannya akan ditentukan apakah kita masih memiliki komitmen kemanusiaan dan keagamaan sekaligus. Sudah tentu semuanya akan dilihat Allah sebagai keshalihan sosial dan keshalihan serta moralitas publik yang akan dihargai sesuai janji Allah sendiri.

Kritik sebagai Metode, Etika dan Pemberdayaan Intelektual

Selain persalan ekonomi dan sikap terhadap ilmu seperti yang di-

kemukakan di atas, aspek lain yang tidak kalah pentingnya ialah kualitas intelektual yang selama ini terlibat dalam pendidikan Islam. Persoalan menjadi sulit ketika ilmu dan kebudayaan dipandang terlepas dari iman dan kebenaran Islam bahwa hanya dengan meyakini kebenaran seluruh doktrin Islam seolah berbagai persoalan duniawi dengan sendirinya selesai.

Ilmu dan kebudayaan dikembangkan secara terbatas dari sumber

***Persoalan menjadi
sulit ketika ilmu dan
kebudayaan
dipandang terlepas
dari iman dan
kebenaran Islam
bahwa hanya dengan
meyakini kebenaran
seluruh doktrin Islam
seolah berbagai
persoalan duniawi
dengan sendirinya
selesai***

teks Alquran dan Sunnah. Sementara alam yang secara jelas dan tidak dapat ditafsirkan kecuali pertanda kekuasaan Allah, dipandang bukan sumber ilmu Islam dan di luar sistem iman. Akibatnya, ilmuan muslim tidak tertarik mengkaji ilmu kealaman dan humaniora, kecuali menyangkut

ibadah *mahdhah* yang secara sepihak dipandang selesai, tidak perlu dikembangkan atau ditinjau ulang. Ilmu-ilmu Fiqh, Tafsir, Kalam, Tasawuf, dan segala ilmu dari teks, dipandang mempunyai derajat kebenaran tertinggi dan masuk wilayah iman.

Hal itu menyebabkan ilmuan muslim enggan atau tidak berani melakukan kritik atas hasil pemiki-

ran klasik, sehingga hampir mustahil mengembangkan kemampuan intelektual kecuali mengulang yang sudah ada. Komunitas intelektual muslim menganggap bahwa pemikiran, ilmu, dan kebudayaan Islam, bersifat eksklusif dan telah selesai dalam khasanah pemikiran klasik, seperti terlihat dari problem pendidikan Islam di atas. Karena itu, pendekatan *kritis* menarik dipertimbangkan, sebagai dasar moral usaha *menembus* sikap ideologis terhadap ilmu dan pemikiran Islam klasik tersebut.

Jalan pengetahuan adalah mata rantai yang mengalir tanpa henti dan titik ujung. *Kritik* adalah dasar etik, sehingga konsep adalah titik istirahat untuk dibongkar dan disusun kembali meniti jalan yang terbuka di depan tanpa batas dan tepian. Di sanalah Tuhan bersemayam dan hanya melalui kritik manusia keluar batas-batas insaniahnya menyentuh wilayah Tuhan melalui hidayahnya.

Sikap tersebut merupakan konsekuensi dinamika sejarah yang selalu menyimpang dari prakiraan yang telah diperhitungkan dengan amat cemat. Sejarah masa depan yang begitu dekat, besok atau be-

berapa detik yang akan datang hingga yang paling jauh seperti masa akhirat, adalah suatu hal yang selalu menjadi rahasia yang hingga kini belum terpecahkan. Hanya saja manusia sering mencoba menghibur diri memasti-mastikan apa yang belum pasti ini.

Dinamika sejarah itu menyebabkan para ahli pendidikan dan ilmu sosial selalu memperhitungkan kembali data dan analisis yang sudah dilakukan. Kejadian besar

dalam sejarah sering berlangsung di luar rancangan manusia yang terlibat didalamnya. Orang pun menyimpulkan bahwa kemampuan tertinggi manusia melihat kenyataan dengan *ilmu* atau meramalkan apa yang akan terjadi, tidak lebih dari melahirkan pernyataan yang nis-caya mendorong

pertanyaan baru. *Chalmers* (1982) menyatakan bahwa konsep ilmiah ialah yang menggugah pertanyaan baru yang lebih mendasar.

Kesalahan paling fatal justru akibat memastikan ilmu yang tidak pernah pasti di atas dengan menerapkan parameter positif. Manusia pun dianggap sebagai realitas yang dapat diukur dengan parameter baku positif itu, sehingga dimensi

Jalan pengetahuan adalah mata rantai yang mengalir tanpa henti dan titik ujung. Kritik adalah dasar etik, sehingga konsep adalah titik istirahat untuk dibongkar dan disusun kembali meniti jalan yang terbuka di depan tanpa batas dan tepian

metafisis rohaniah ditempatkan sebagai mekanisme ketubuhan yang fisis-material. Inilah sumber keterasingan manusia atas dirinya sendiri dan dengan lingkungan hidupnya. Ketakjuban yang selalu menyertai peristiwa besar dalam sejarah adalah karena pernyataan ilmiah disikapi secara ideologis yang menutup semua kemungkinan lain.

Hal ini mendorong filsuf menyatakan bahwa dasar etik ilmu ialah kearifan di mana sikap kritis dan

mekanisme dialogis paling memungkinkan manusia keluar dari keterbatasan melihat kembali jejak ilmu yang telah dan baru dilakukan. Sikap tertutup justru melahirkan berbagai persoalan kemanusiaan yang serius yang dalam peradaban moderen melahirkan pemikiran kritis *postmodernisme*.

Gejala keilmuan dan kemisteriusan sejarah itu seperti halnya misteri jagad raya dan manusia, sehingga sejarah disebut sebagai aktualisasi diri manusia. Hal ini juga mengundang persoalan yaitu ukuran yang sah dari aktualitas kedirian yang mendorong tumbuhnya sikap bijaksana terhadap setiap data aktual, sehingga mekanisme dialogis adalah jalan mencari aktualitas kemanusiaan tersebut.

Persoalannya ialah apa dan bagaimana fungsi ilusi bagi sebuah masa depan yang dicitakan. Pertanyaan yang terkandung dianggap mengada-ada ini menjadi aktual ketika manusia selalu mencari hubungan pendidikan dengan suatu anggapan dasar dan realitas sosial seperti gejala kehidupan empiris. Dalam hubungan inilah daya kritis merupakan jalan bagi manusia untuk mengatasi berbagai keterbatasannya.

***dasar etik ilmu
ialah kearifan
dimana sikap kritis
dan mekanisme
dialogis paling
memungkinkan manusia
keluar dari
keterbatasan melihat
kembali jejak
ilmu yang telah dan
baru dilakukan***

Mengabaikan sikap kritis mendorong ideologisasi ilmu yang menutup semua kemungkinan yang terbuka luas sepanjang sejarah, jauh di luar batas keluasan dunia yang mungkin dikenali. Ilmu yang diperoleh manusia sepanjang sejarah hingga era terakhir ini, tidak lebih sebagai sekadar sebuah jarum yang

jatuh di tengah lautan pasir.

Oleh karena itu, setelah sikap kritis yang menjadi akar dari dasar metodologis juga menjadi dasar etik pengembangan ilmu bahkan sikap kritis adalah dasar ontologis. Melalui kritik inilah manusia akan dapat keluar dari batas-batas dunia mencapai wilayah metafisika dan selanjutnya berhubungan serta menyadari kehadiran Tuhan.

Melalui kritik, intelektualitas muslim dapat dikembangkan dan diberdayakan sebagai dasar kepercayaan iman yang masuk wilayah metafisika, sehingga pengetahuan adalah tahap awal proses iman yang tingkatannya berbeda bagi setiap orang. Turunnya lima ayat pertama surat *Iqra'* bukan tanpa alasan bagi pengkritisan tradisi lama untuk menumbuhkan kesadaran baru di bawah pencerahan iman. Sayangnya pengembangan intelektualitas belum merupakan kesadaran sosial, bahkan belum juga merupakan kesadaran personal tetapi lebih merupakan sebagai pengalaman yang disengaja.

Pengalaman sejarah Islam dan dunia, menunjuk peran strategis pengalaman kolektif pengembangan intelektualitas. Orde risalah Muhammad Saw juga tumbuh dalam solidaritas kolektif komunitas sahabat. Demikian pula peran meta sejarah *Ashabul Kahfi* hingga "madzhab Frankfurt" dari dunia pemikiran moderen yang dapat dirunut dalam metode dialektif model Socrates.

Dalam sejarah pasca Rasul, dapat dilihat solidaritas kolektif kaum intelektual yang dikenal dengan *Ihwanus Shofa* sekitar abad ke-13 M.

Namun, pengembangan pengalaman kolektif belum merupakan kesadaran yang terstruktur dan terprogram. Pendidikan yang selama ini dikembangkan pun lebih merupakan promosi individual tanpa tujuan kolektif yang jelas.

Jika kita melihat lahirnya seorang intelektual lebih banyak karena peluang yang tidak direncanakan yang tiba-tiba datang hanya karena sejarah di belakang mereka.

Betapa banyak tertelantarnya anak-anak masa depan yang potensial menjadi intelektual hanya karena tidak mengetahui jalan sosial yang harus ditempuh.

Kalangan yang terbelakang itu, juga terperangkap dalam penjara sosial, ekonomi, dan politik, sejarah kemiskinan orang-

tua dan lingkungan tempat mereka hidup, tinggal, dan dibesarkan. Betapa banyaknya anak-anak desa yang brilian dan muhlis, namun nasib mereka terhenti karena tidak banyak orang menaruh perhatian. Betapa banyaknya mahasiswa yang cerdas menjadi kandas karena biaya dan karena tidak tahu peluang serta tidak ada yang berusaha menciptakan peluang.

Berbeda dengan tantangan sejarah masa lalu yang dapat dijawab

***Melalui kritik,
intelektualitas muslim
dapat dikembangkan
dan diberdayakan
sebagai dasar kepercayaan
iman yang masuk
wilayah metafisika,
sehingga pengetahuan
adalah tahap awal
proses iman yang
tingkatannya berbeda
bagi setiap orang***

oleh intelektual dengan pengalaman personal dan usia yang relatif lambat. Masa depan memerlukan intelektual yang ahli dibidangnya, tapi memiliki wawasan seluruh ujung dan titik-titik terjauh di dunia yang mengecil seperti sekarang. Jika sistematisasi ilmu seperti yang ada dapat diterima, masa depan memerlukan intelektual yang ahli dalam satu bidang yang berkapasitas memperoleh hadiah nobel, tapi jaga sangat paham terhadap prinsip dasar semua bidang ilmu. Jika sistem pendidikan juga diterima, intelektual masa depan harus bergelar doktor atau setingkat itu pada usia di bawah 30 tahun dan dengan usia hidup lebih lama, sehingga memiliki masa kerja sekitar 20 hingga 30 tahun sebelum pensiun karena ketentuan.

Menjadi ahli di bidangnya tidak dapat dipercayakan pada gelar doktor dan pendidikan formal semata, apalagi untuk dapat memiliki wawasan luas dalam semua bidang ilmu. Untuk itu, diperlukan upaya kolektif sehingga usia 30 tahun bukan hanya sudah memperoleh gelar doktor tetapi telah memiliki kematangan intelektual. Bukan hanya doktor yang pandai menjelaskan suatu disiplin ilmu, tapi tidak memiliki kapasitas melahirkan konsep serta teori baru

yang lebih kritis berdasar paradigma iman. Diperlukan suatu usaha mempercepat dan memperkaya pengalaman kolektif kematangan intelektual tersebut.

Beberapa upaya teknis mungkin dapat direkomendasi seperti model ihwanus sofa atau kolektivitas sahabat dan Ashabul Kahfi. Beberapa orang perlu tinggal bersama dengan keragaman ilmu dengan tugas mengkaji seluruh khasanah ilmu di

bidangnya hingga temuan paling mutakhir di seluruh ujung dunia. Dalam periode tertentu setiap orang melaporkan hasil temuannya, baik merupakan reportase, atau pengembangan yang ia lakukan kepada kelompok yang terorganisasi dan mendiskusikan bersama. Dalam waktu relatif singkat, kelompok ini akan

Masa depan memerlukan intelektual yang ahli dibidangnya, tapi memiliki wawasan seluruh ujung dan titik-titik terjauh di dunia yang mengecil seperti sekarang

segera menguasai puncak-puncak peradaban dunia sebagai dasar pemikiran baru yang lebih kritis.

Mereka bukanlah kelompok yang berdiri di atas menara gading, tapi hidup di tengah masyarakatnya yang memiliki komitmen atas agenda-agenda kerja pembelaan masyarakat. Mungkin diperlukan sekelompok orang yang memilih bidang operasional tapi tetap merupakan bagian yang tidak terpi-

sahkan dari intelektual kolektif tersebut.

Untuk itu, maka perlu disediakan pustaka dari puncak pemikiran dunia sepanjang sejarah dunia Islam dan lainnya, selain jurnal mutakhir dari seluruh ujung dunia bersama koran-koran utama. Jika ini sulit, setiap anggota kelompok harus bersedia mencari dan membaca sendiri dan secara periodik melaporkan dalam diskusi kelompok. Hasilnya akan segera jelas sesudah strategi kolektif itu dijalankan, sehingga lebih baik hasilnya dengan bertanya daripada meramal apa yang bisa dilakukan dan kapan dimulai.

Lembaga pendidikan tinggi Islam sangat strategis dan paling berpeluang mengembangkan usaha tersebut. Namun perlu idealisme, ketekunan yang luar biasa dan kesediaan membaktikan diri dalam kegiatan yang untuk waktu yang cukup lama mungkin tidak populer dan kurang dikenal orang banyak. Tapi justru dari model pengembangan intelektual inilah akan lahir konsep-konsep besar berbagai bidang ilmu dan kebudayaan. Jika tidak, pendidikan tinggi Islam tidak lebih dari umumnya lembaga lainnya yang kelak akan terperangkap menjadi tukang ilmu yang hanya mengulang kaji apa yang ada, tanpa peluang dan berniat melahirkan konsep ilmu diperhitungkan oleh zaman, sejarah, dan peradaban manusia.

Drs. Abdul Munir Mulkhan, SU,
adalah Dosen Fakultas Tarbiyah LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepustakaan

- Al Abrasyi, M.A., 1977, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Al-Attas, S.M.A., 1972, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Mizan, Bandung.
- Al Syaibany, O.M.A., 1979, *Falsafah Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ba-Yunus, I, Farid Ahmad, 1993, *Sosiologi Islam & Masyarakat Kontemporer*, Mizan, Bandung.
- Berger, P.L., 1982, *Piramida Kurban Manusia; Etika Politik dan Perubahan Sosial*, LP3ES, Jakarta.
- , 1991, *Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial* LP3ES, Jakarta.
- Berger, P.L. & Thomas Luckmann, 1990, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta.
- BPS, 1984, *Beberapa Ciri Pemeluk Agama di Indonesia 1980*, BPS, Jakarta.
- BPS, 1994, *Beberapa Ciri Pemeluk Agama di Indonesia 1990*, BPS, Jakarta.
- Chalmers, A.F., 1982, *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu*, Hasta Mitra, Jakarta.
- Chambers, R., 1987, *Pembangunan Desa Mulia Dari Belakang*, LP3ES, Jakarta.
- Daradjat, Z. (dkk), 1992, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet 2, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djojonagoro, W, 1993, "Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 Tahun, dalam Mengisi Pembangunan Berkesinambungan", dalam Prisma No. 5 Tahun XXIII, Mei 1994.
- Ditjen Binbaga Islam, 1995, *Topik Inti Kurikulum Nasional LAIN Fak. Tarbiyah*, Jakarta.
- Freire, P., 1984, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Gramedia, Jakarta.
- Haq, M., 1983, *Tirai Kemiskinan; Tantangan-tantangan Untuk Dunia Ketiga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hardiman, F.B., 1993, *Menuju Masyarakat; Ilmu, Masyarakat & Postmoderenisme Menurut Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta.
- , *Kritik Ideologi; Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hawking, S., 1995, *Blacks Holes And Baby Universes; Lubang Hitam dan Jagat Bayi dan Sesai-sesai Lain*, Gramedia Jakarta.
- , 1994, *Riwayat Sang Kala; Dari Dentuman Besar hingga Lubang Hita*, Pustaka Grafiti Utama, Jakarta.
- Husaini, S.W.A., 1993, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Pustaka, Bandung.
- Iqbal, M., 1996, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Izutzu, T., 1993, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur'an Tiara Wacana*, Yogyakarta.